

**EFEKTIVITAS ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TEBINGTINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh

**Syahputra Umar Lubis¹,
Tjahya Supriatna², Ondo Riyani³**

¹⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
oemar180@ipdn.ac.id

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The Housing Settlement and Hygiene Agency in waste management is less effective because of the lack of cooperation between the Housing and Sanitation Office of Tebingtinggi City and stakeholders so that the process of waste management is not fast, effective, and efficient starting from the objectives, strategies, policy, planning, programs, facilities and infrastructure, supervision and control.

The Housing Office for Settlements and Hygiene of Tebingtinggi City in dealing with the problems that are hampering is not evaluating the extent of the implementation of waste management. Broadly speaking, the Housing and Settlement Service Office of Tebingtinggi City is less active in responding to all the problems that occur during the waste management process. The number of workers who are few in the field of hygiene, especially those who carry and collect garbage are not balanced with work so that in waste management become ineffective.

It is expected that the people of Tebingtinggi City will want to participate as much as possible to maintain the cleanliness of the environment and do reforestation starting from their own place of residence, and support policies that have been made by the government. The form of community participation in gaining Adipura trophies in Tebingtinggi city can be seen from the willingness of the community to pay waste fees, carry out mutual assistance activities around their homes, participate in green activities. The community must be involved in following the socialization and understanding of the concept of 3R (reduce, reuse, recycle) or reduce, reuse and recycle waste that can still be utilized by the City Government, especially the Housing and Sanitation Office of Tebingtinggi City. The purpose of this paper is to find out and analyze the effectiveness of the Sanitation Service Organization in waste management in Tebingtinggi City.

This writing is more directed at qualitative writing specifically to answer the problem formulation, the source of this writing uses primary data and secondary data in the form of data or information obtained through the words and actions of informants taken through observation and interviews. In determining the informants by using purposive techniques, explaining, the sample for qualitative methods is purposive in meaning in accordance with the intent and purpose of writing.

Keywords: *effectiveness, efficiency, productivity*

ABSTRAK

Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah kurang berjalan efektif hal ini karena tidak adanya kerja sama yang terjalin antara Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dengan para *stakeholders* sehingga dalam proses pengelolaan sampah tidak cepat secara tepat, efektif, dan efisien mulai dari tujuan, strategi, kebijaksanaan, perencanaan, program, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian,

Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat adalah tidak melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah. Secara garis besar, Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi kurang berperan aktif dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses pengelolaan sampah, Jumlah pekerja yang sedikit di bidang kebersihan khususnya yang bertugas mengangkut dan mengumpulkan sampah tidak seimbang dengan pekerjaan sehingga dalam pengelolaan sampah menjadi tidak efektif.

Diharapkan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mau berpartisipasi semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan dimulai dari tempat tinggal sendiri, dan mendukung kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam meraih piala Adipura di Kota Tebingtinggi dapat dilihat dari kemauan masyarakat dalam membayar retribusi sampah, melakukan kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalnya, ikut dalam kegiatan penghijauan. Masyarakat harus terlibat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas organisasi dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi. Penelitian ini lebih diarahkan pada penelitian kualitatif khususnya untuk menjawab rumusan masalah. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa data atau informasi yang didapatkan melalui kata-kata dan tindakan informan yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, produktivitas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi:

1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain;

- 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain;
- 3) sampah yang berupa debu/abu; dan
- 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Berkaitan dengan permasalahan aktual yang dihadapi kota-kota di Indonesia, maka pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari upaya menciptakan iklim kota yang kondusif. Seperti halnya kota-kota di Indonesia, Kota Tebingtinggi pun

tidak lepas dari masalah klasik yang berkaitan dengan sampah. Besarnya jumlah penduduk, keterbatasan fungsi lahan dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan bertumpuknya sampah di berbagai sudut kota.

Sudrajat (2002: 6) mengemukakan bahwa permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural, karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota. Menurut prakiraan volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata 0,5 kg/kapita/hari.

Mencermati data di atas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan (DPPK) Kota Tebingtinggi 50%-nya dapat digunakan untuk mengangkut sampah di Kota Tebingtinggi. Dalam kegiatan pengelolaan sampah, jumlah truk pengangkut sampah dinilai masih kurang dalam mendistribusikan sampah dari lima kecamatan ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Kota Tebingtinggi. Maka dapat diasumsikan bila dengan jumlah penduduk saat ini, maka timbunan sampah yang dihasilkan semakin melimpah per harinya. Sementara itu sarana pengangkut sampah hanya 50% dari total yang dapat digunakan. Hal tersebut membuat penanganan sampah terhambat karena proses transfer sampah dari sumbernya ke TPA hanya bisa dilakukan maksimal dua kali dalam sehari.

Cointreau dalam *Urban Management Programme* (1994: 57) juga menyatakan bahwa tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini, tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah sebagai berikut.

- a) Pesatnya pertumbuhan kota,
- b) Pesatnya/cepatnya penambahan penduduk di kota, akibatnya makin banyak pula sampah yang dihasilkan, karena berbanding lurus, banyaknya permukiman kumuh, lingkungan kumuh dan sebagainya.

- c) Tuntutan penyediaan fasilitas publik perkotaan
- d) Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam pengelolaan sampah
- e) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya partisipasi dalam membayar retribusi layanan kebersihan.

Kota Tebingtinggi merupakan salah satu kota yang berada di dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara, dengan memiliki enam kecamatan. Sesuai data yang dirilis oleh BPS yang diterbitkan dalam *Kota Tebingtinggi Dalam Angka 2017*, pada 2016 Kota Tebingtinggi adalah kota persinggahan yang memiliki luas 38,438 km² dengan jumlah penduduk 158.902 jiwa. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS dari *Kota Tebingtinggi Dalam Angka 2017* menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Tebingtinggi mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir ini, yaitu:

Pemerintah Kota Tebingtinggi adalah kota yang mendapat penghargaan Piagam Adipura tiga tahun terakhir sebagai Amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025, serta upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.¹

Namun daerah ini tak terlepas juga dari masalah kebersihan terutama masalah pengelolaan sampah. Piala Adipura yang diraih Kota Tebingtinggi dengan kota bersih

1 [http://portal.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/kota-tebing-tinggi-berhasil-meraih-adipura-untuk-ke-3-kalinya-secara-berturut-turut-dilansir-pada-Senin-\(26/11/2018\)-pukul-14.00-WIB](http://portal.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/kota-tebing-tinggi-berhasil-meraih-adipura-untuk-ke-3-kalinya-secara-berturut-turut-dilansir-pada-Senin-(26/11/2018)-pukul-14.00-WIB)

dan rapi dinilai belum dapat sepenuhnya mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi suatu barang atau hal yang bermanfaat bagi masyarakatnya itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana Kota Tebingtinggi dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Kebersihan hanya dilakukan pada inti kota, akan tetapi tidak begitu bersih pada sudut kotanya.²

Kota Tebingtinggi juga mempunyai masalah di bidang pengelolaan sampah dengan sistem TPS 3R (*tempat pengelolaan sampah reuse reduce recycle*) yang menjadi wacana Wali kota ditujukan kepada DPPK Kota Tebingtinggi belum berjalan sepenuhnya, dikarenakan kurangnya SDM masyarakat dan partisipasi masyarakat akan kepedulian lingkungan yang perlu dibenahi secara gotong royong. Setiap orang itu memproduksi 7 ons sampah dan bila kita kalikan dengan jumlah penduduk Kota Tebingtinggi saat ini, maka sampah yang dihasilkan bisa mencapai 120 ton sampah per harinya, pernyataan wali kota melalui *website* resmi Kota Tebingtinggi.³

Permasalahan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas menjadi dasar dalam mengidentifikasi beberapa masalah berkaitan dengan Efektivitas Organisasi Dinas Perubahan Permukiman dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tebingtinggi adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk;

- b. Kurangnya sarana prasarana penunjang operasional pengelolaan sampah;
- c. Kurangnya pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri;
- d. Keterlambatan dalam pemberian honor tenaga harian lepas bidang kebersihan DPPK Kota Tebingtinggi.

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai efektivitas organisasi DPPK Kota Tebingtinggi dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi.

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas organisasi DPPK Kota Tebingtinggi dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah apa yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas organisasi DPPK Kota Tebingtinggi dalam masalah pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas menurut Gibson dalam Tangkilisan (2007: 141) mengemukakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dari beberapa definisi, penulis memilih Teori Gibson tersebut di atas sebab merujuk kepada efektivitas dalam suatu organisasi

2 [http://portal.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/kota-tebing-tinggi-berhasil-meraih-adipura-untuk-ke-3-kalinya-secara-berturut-turut-dilansir-pada-Senin-\(26/11/2018\)-pukul-14.30-WIB](http://portal.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/kota-tebing-tinggi-berhasil-meraih-adipura-untuk-ke-3-kalinya-secara-berturut-turut-dilansir-pada-Senin-(26/11/2018)-pukul-14.30-WIB)

3 [http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/umar_letakkan_batu_pertama_pembangunan_pengolahan_sampah/dilansir-pada-Selasa,\(16/10/2018\)-pukul-20.00-WIB](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/umar_letakkan_batu_pertama_pembangunan_pengolahan_sampah/dilansir-pada-Selasa,(16/10/2018)-pukul-20.00-WIB)

dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai hasil yang ingin didapatkan. Konsep efektivitas organisasi banyak digunakan di antaranya adalah menyamakan istilah efektivitas dengan keuntungan ataupun produktivitas. Namun demikian efektivitas organisasi akan lebih baik dinilai dan tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai.

Adapun kriteria ataupun atau ukuran mengenai pencapaian tujuan apakah efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (2007: 142) berikut ini.

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "padajalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi pada masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi

adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Organisasi

Hardjito dalam Tangkilisan (2007: 150) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi:

1. Struktur;
2. Tujuan;
3. Hukum;
4. Prosedur pengoperasian yang berlaku;
5. Teknologi;
6. Lingkungan;
7. Kompleksitas;
8. Spesialisasi;
9. Kewenangan;
10. Pembagian tugas.

Pencapaian efektivitas dalam pengelolaan sampah sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor pendukung atau pun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau upaya dari pihak DPPK tersebut dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi. Setiap organisasi memiliki kerangka acuan yang berbeda satu sama lain seperti pendapat Hall dalam Tangkilisan (2007: 150) menyatakan "dalam menilai efektivitas suatu organisasi, baik organisasi publik maupun privat, terdapat sejumlah model pendekatan yang dapat digunakan di antaranya *system resource model*, *the goals model*, dan *social function model*". Pendekatan ini diartikan sebagai pendekatan atau teori terhadap capaian suatu tujuan.

Efektivitas Organisasi Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan suatu kegiatan merasa sangat diharapkan, karena dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan berusaha menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam usaha menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagai wadah negara Indonesia yang bersatu dan berdaulat.

Perspektif efektivitas menekankan peran sentral pencapaian tujuan organisasi di mana dalam menilai organisasi apakah yang dapat bertahan hidup atau tidak, dilakukan evaluasi yang relevan dengan tujuan tersebut. Empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi menurut Steers dalam Tangkilisan (2007: 151) adalah

1. Karakteristik organisasi;
2. Karakteristik lingkungan;
3. Karakteristik pekerja;
4. Karakteristik praktik manajemen;

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri, sehingga efektivitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya selalu berpedoman pada pencapaian tujuan.

Peran dan Fungsi Pemerintahan

Van Poelje dalam Muchlis Hamdi, (1999: 52) mengemukakan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu, yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Fungsi pemerintahan antara lain sebagai berikut.

Pertama, fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-

menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apa pun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

Kedua, fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi:

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-

negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara

Pratikno (2002: 61), menyatakan bahwa otonomi yang lebih besar tidak serta merta akan memperbesar aktivitas pemerintah daerah dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun, sejalan dengan angin liberalisasi ekonomi, otonomi yang lebih besar tersebut tampaknya hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Walaupun mempunyai otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah akan 'terpaksa' untuk lebih menekankan pada "keterlibatan tidak langsung" (*steering*) daripada "keterlibatan langsung" (*rowing*). Masih menurut Pratikno (2002: 62), instrumen keterlibatan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik bisa dikelompokkan paling tidak dalam empat kategori berikut.

1. *Government provision*

Government provision pada hakikatnya merupakan bentuk peran pemerintah secara langsung di mana pemerintah menyediakan pelayanan kepada

masyarakat tanpa melakukan pemungutan kepada individu-individu yang menikmatinya.

2. *Government production*

Government production memosisikan pemerintah dalam ikut serta memproduksi barang dan jasa sebagaimana pelaku-pelaku bisnis swasta.

3. Subsidi

Subsidi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung dan pada dasarnya adalah berupa bantuan atau *grants*, bantuan dapat berupa secara langsung maupun tidak langsung.

4. Regulasi

Regulasi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung berupa pembuatan kebijakan pelayanan yang ditujukan baik kepada pihak produsen pelayanan maupun pihak konsumen.

Good and Clean Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Good and clean governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan bersih, Budiati (2014: 33) menyatakan *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan/manajemen pembangunan menempatkan peran sentral pemerintah. Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat (berkembang/developing) dalam negara berkembang.

Budiati (2014: 3) juga menyatakan inti perwujudan *good governance* di bidang lingkungan hidup adalah terwujudnya kelembagaan yang visioner, kuat, *capable*, *responsible*, dan *accountable* sehingga memiliki kewenangan yang *authoritative* dalam proses kebijakan. Hal ini penting dikedepankan karena berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa tata kelola

organisasi bidang pengelolaan lingkungan hidup kurang memiliki kinerja yang ideal sebagai lembaga yang dirancang untuk menangani urusan wajib.

Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek/komponen yang saling mendukung di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut di atas dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.

Aspek teknis operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek persampahan. Perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral secara berantai dengan urutan, yaitu penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

Aspek teknik operasional adalah upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

- a) Penampungan sampah
- b) Pengumpulan sampah
- c) Pemindahan sampah
- d) Pengangkutan sampah
- e) Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi tiga metode, yaitu metode *open dumping*, metode *controlled landfill*, dan metode *sanitary landfill*.

Dampak Pengelolaan Sampah

Purwendro dan Nurhidayat (2010: 5) menjelaskan sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Bahkan sampah bisa berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.

Jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu dampak terhadap kesehatan dan terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Menurut Sofian (2010: 2) sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, asalkan mau memilahnya antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Adapun sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa mengalami pelapukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dan mengenai metode yang digunakan dalam suatu penelitian pemerintahan, maka digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-induktif guna menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya, serta penulis tidak dibatasi oleh alat ukur sebagaimana dalam penelitian kuantitatif agar menemukan gambaran permasalahan-permasalahan dan hubungannya dengan fenomena yang ada sehingga dapat diambil suatu simpulan guna menemukan pemecahan masalah juga informasi-informasi baru yang diperoleh saat penelitian misalnya berkaitan dengan latar belakang fenomena gejala sosial yang muncul, atau hal-hal lain yang pada awalnya tidak diketahui penulis.

Mengingat kekhususan permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi, maka pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan *system snow ball* yakni menelusuri sumber untuk mencari akar permasalahan.

Menurut Silalahi (2010: 289) "data dari suatu penelitian dapat dikumpulkan dari beberapa sumber" Data menurut sumbernya dapat dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Sumber data primer dan sumber data sekunder penjelasannya sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010: 225), yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dan terkait dengan Efektivitas Organisasi DPPK dalam Pengelolaan Sampah Kota Tebingtinggi di antaranya: Kepala DPPK Kota Tebingtinggi, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Seksi Kebersihan, dan Petugas Pelaksana lapangan DPPK Kota Tebingtinggi.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010: 225), yaitu data yang tidak memberikan informasi

secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian Efektivitas Organisasi DPPK dalam Pengelolaan Sampah Kota Tebingtinggi. Dokumentasi yang diamati di antaranya: jumlah petugas pelaksana lapangan DPPK Kota Tebingtinggi, jumlah sampah kecamatan per harinya, Jumlah TPA setiap kecamatan, jumlah sarana pengangkut sampah DPPK Kota Tebingtinggi, usaha kecil menengah (UKM) dalam pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Sumber penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berupa data atau informasi yang didapatkan melalui kata-kata dan tindakan informan yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Sumber data lainnya, yaitu melalui arsip, dokumen resmi, foto, data statistik, artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal maupun artikel-artikel yang ditemukan dalam surat kabar maupun dalam *website* yang menunjang penulis dalam pengumpulan data.

Informan penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif menduduki posisi yang sangat penting. Dalam penelitian ini sumber data adalah:

1. Kepala DPPK Kota Tebingtinggi.
2. Sekretariat Kepala DPPK Kota Tebingtinggi.
3. Kepala Subbagian Penyusunan Program DPPK Kota Tebingtinggi.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DPPK Kota Tebingtinggi.
5. Kepala Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah DPPK Kota Tebingtinggi.
6. Masyarakat Kota Tebingtinggi.
7. Individu/kelompok petugas pelaksana pembuangan/pemusnahan.

(Sumber: DPPK Kota Tebingtinggi, 2017)

Dalam penelitian ini diperlukan data yang valid (menggambarkan apa yang sebenarnya), reliabel atau terandalkan (data itu dapat dipercaya), dan objektif, oleh karena itu dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu input, proses, dan output yang dihasilkan. Pada tahap input, dilakukan analisis untuk melihat karakteristik responden, kondisi wilayah baik mikro atau makro, kondisi persampahan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahap proses, dilakukan berbagai analisis untuk masing-masing input. di antaranya dilakukan melalui analisis deskriptif. Kemudian dihasilkan output pada masing-masing proses input. Hasil tersebut antara lain kondisi pengelolaan sampah dalam partisipasi masyarakat khususnya informan penelitian di Kota Tebingtinggi dalam pengelolaan sampah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tebingtinggi

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas bergantung pada keseimbangan antara tujuan, kemampuan dan sumber daya manusianya. Adapun upaya mencapai tujuan, yaitu dengan menunjukkan penentuan

alternatif strategi dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi.

Pemerintah Kota Tebingtinggi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah yang diturunkan dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan didetailkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kontribusi SKPD lain terhadap program pengelolaan sampah dari DPPK itu sendiri bahwa Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam proses pelaksanaan pengelolaan persampahan telah melakukan upaya sekeras mungkin dalam hal pengendalian kebersihan hal itu terlihat dari upaya dalam melibatkan seluruh instansi pemerintahan dan lainnya, dan juga berupaya bersama-sama untuk tetap selalu mengawasi seluruh elemen yang terlibat dalam pengendalian kebersihan dalam hal ini petugas kebersihan di lapangan.

Kontribusi SKPD lain terhadap program pengelolaan sampah dari DPPK itu sendiri untuk mewujudkan kebersihan di Kota Tebingtinggi maka seluruh elemen harus bergerak serentak dalam kegiatan kebersihan, baik itu yang dilakukan oleh lembaga swadaya maupun yang lainnya, semua harus dilakukan di seluruh bagian yang selalu menjadi masalah-masalah kebersihan baik itu di jalan raya, sekolah, perumahan, dan yang lainnya dan kegiatan itu semua harus melibatkan SKPD dan masyarakat sehingga rasa kebersamaan dan rasa pentingnya kebersihan dapat merasuki pikiran masyarakat dan melaksanakan kegiatan kebersihan yang ditetapkan oleh DPPK Kota Tebingtinggi agar kebersamaan dapat tetap terjalin.

Sumber daya manusia (SDM) sangat penting di dalam melaksanakan suatu

program dan kegiatan karena sumber daya manusia merupakan penggerak pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. Sumber daya aparatur, merupakan kebutuhan mutlak yang dilaksanakan pada setiap kinerja dalam suatu organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pengelolaan sampah informasi kepada *stakeholders* yang pada dari seluruh rangkaian proses pengelolaan sampah. Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh DPPK Kota Tebingtinggi untuk menciptakan sebuah kinerja organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis, dan terencana berupa aparatur yang terampil, inovatif, kreatif, dan ahli dalam bidangnya.

Pengembangan sumber daya aparatur DPPK Kota Tebingtinggi diarahkan kepada kinerja yang maksimal pada saat pengelolaan sampah berupa memberikan pengelolaan sampah yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah sehingga masyarakat terbebas dari sampah-sampah yang kotor. Selain melakukan pengelolaan sampah yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan kualitas SDM, agar tercipta pengelolaan sampah yang efektif. Prosedur atau cara kerja di dalam suatu organisasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kualitas pengelolaan sampah akan mendorong terwujudnya kepuasan di dalam suatu organisasi dan tumbuhnya rasa memiliki di antara mereka. Kualitas pengelolaan sampah tercermin dalam lingkungan internal yang kondusif (melalui pemberdayaan, delegasi wewenang, saling percaya, komunikasi yang efektif, dan sebagainya) serta implementasi total human reward (dalam bentuk finansial: gaji, bonus, kenaikan gaji, maupun nonfinansial seperti pujian, kesempatan mengikuti pendidikan,

dan pelatihan tambahan). Pada saat proses pengelolaan sampah terdapat kendala yang dihadapi, yaitu berupa dana yang minim.

Dengan dana yang minim dalam proses pengelolaan sampah, menyebabkan kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki DPPK Kota Tebingtinggi dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya demi terciptanya sebuah kinerja yang optimal, sehingga menjadi penentu kualitas pengelolaan sampah yang diberikan. Kehandalan yang dimiliki aparatur DPPK Kota Tebingtinggi pada saat melakukan pengelolaan sampah juga menjadi penentu keberhasilan kinerja DPPK Kota Tebingtinggi. Sumber daya aparatur yang dimiliki DPPK Kota Tebingtinggi pada saat melakukan pengelolaan terbilang masih kurang, tidak hanya karena kuantitas pegawai tetapi karena pendidikan atau kemampuan aparatur yang kurang.

DPPK Kota Tebingtinggi mempunyai pegawai yang terbatas ditambah dengan pendidikan yang kurang menunjang, masih terdapat pendidikan SMA, SMP, atau bahkan SD. Hal ini terjadi pada kru lapangan, maka dari itu tidak hanya masyarakat yang perlu dibina tetapi pegawai pun yang harus dibina terlebih dulu untuk memberikan contoh dan pengelolaan sampah yang maksimal kepada masyarakat.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Efektivitas DPPK dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tebingtinggi

DPPK Kota Tebingtinggi dalam melakukan proses pengelolaan sampah belum cukup maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kurang responsifnya masyarakat berpartisipasi pada proses pengelolaan sampah, kurangnya antusiasme masyarakat menyebabkan responsivitas masyarakat kurang disertai dengan kesadaran masyarakat akan menciptakan ruang yang bersih dan nyaman.

Kerja sama antara *stakeholders* dalam pengelolaan sampah kebersihan di Kota

Tebingtinggi mewujudkan pengelolaan sampah yang adil, merata dan menyeluruh dalam kegiatan pengelolaan sampah telah dilakukan DPPK Kota Tebingtinggi sebagai bentuk tanggung jawab DPPK Kota Tebingtinggi dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan agar sesuai dengan target dan tujuan yang semula telah ditetapkan DPPK Kota Tebingtinggi untuk suatu pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya sebagai suatu acuan untuk ke depannya.

Kerjasama dalam menjalin komunikasi dengan para *stakeholders* perlu dilakukan DPPK Kota Tebingtinggi agar segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* dapat terpenuhi selama proses pengelolaan sampah berlangsung. Kegiatan pengelolaan sampah tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari masing-masing aparat DPPK Kota Tebingtinggi dan elemen penting lainnya. Untuk membangun kerjasama yang intensif antara DPPK Kota Tebingtinggi dengan seluruh *stakeholders*, maka DPPK Kota Tebingtinggi mengharuskan mengirimkan perwakilannya untuk senantiasa bekerja sama dengan para *stakeholders* di lapangan. DPPK Kota Tebingtinggi sebagai perantara berkomunikasi dengan *stakeholders* untuk mendukung proses kelancaran pengelolaan sampah. Kerjasama ini membentuk suatu tim yang solid untuk membangun proses pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif, namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak semua *stakeholders* mendukung proses pengelolaan sampah ini.

Apabila terjalin suatu hubungan yang sinergis antara DPPK Kota Tebingtinggi dengan para pelaku usaha akan menghasilkan suatu solusi baru dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang menghambat proses pengelolaan sampah. Kerjasama yang kurang terjalin antara DPPK Kota Tebingtinggi dengan masyarakat menghasilkan suatu hal yang kurang memberikan kontribusi pada proses pengelolaan sampah. Untuk

memberikan hasil yang maksimal terhadap proses pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi harus terjalin kerjasama antar aspek-aspek pengelolaan sampah yang meliputi aspek organisasi/kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek teknik operasional dan aspek peran serta masyarakat. Aspek kelembagaan di sini adalah DPPK Kota Tebingtinggi sebagai aktor dalam menangani proses pengelolaan sampah. Aspek peraturan, yaitu peraturan-peraturan yang terkait dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi Tingkat kesesuaian dari serangkaian tahapan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DPPK Kota Tebingtinggi pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DPPK Kota Tebingtinggi yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang digunakan pada saat proses pengelolaan sampah. Untuk menuju pengelolaan sampah yang adil dan merata maka diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah dilaksanakan dari seluruh rangkaian program-program yang telah terencana dan terlaksana dengan baik. Adanya kegiatan yang dilaksanakan akan kegiatan tersebut dapat diketahui apakah berhasil atau tidak, salah satu caranya ialah dapat dilihat dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sesuatu untuk mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, bagian dari sanksi dan penghargaan.

Kewajiban dari DPPK Kota Tebingtinggi ialah mewujudkan kesesuaian kinerja dan keakuratan hasil-hasil yang telah diperoleh selama kegiatan pengelolaan sampah berlangsung.

Tingkat kesesuaian dan tindakan yang dilakukan oleh DPPK Kota Tebingtinggi menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan apakah akuntabilitas DPPK Kota Tebingtinggi selama melakukan proses pengelolaan sampah tersebut telah sesuai dengan target yang telah diharapkan sebelumnya atau tidak. Mewujudkan akuntabilitas merupakan hal yang harus dilakukan DPPK Kota Tebingtinggi demi menciptakan sebuah kinerja yang maksimal dan sebagai dasar acuan dalam pengukuran kinerja agar dapat berjalan dengan semestinya.

Adapun cara dari DPPK Kota Tebingtinggi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang menghambat pengelolaan sampah adalah dengan cara melakukan penataan 3R, penataan kembali eks TPA, pembuatan roda hijau, pembuatan *container* khusus untuk pembuatan kompos, pengadaan mesin pencacah sampah organik, pembuatan keranjang komposter, pembuatan komposter drum, pengadaan tong sampah terpilah dua warna, pembuatan atau renovasi kendaraan pick up menjadi kendaraan patrol dan kendaraan pengelolaan sampah prima serta pengadaan sepeda patrol kebersihan untuk lokasi *car free day*. Pemaparan tersebut merupakan wacana dari DPPK Kota Tebingtinggi untuk meminimalisir permasalahan yang menghambat proses pengelolaan sampah, namun pada kenyataannya hal tersebut belum terlaksana.

Tingkat kesesuaian DPPK Kota Tebingtinggi dalam pengelolaan sampah sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang berlaku, namun ada beberapa hal yang belum terwujud akibat dari permasalahan meningkatnya jumlah sampah, kurangnya sarana dan prasarana operasional, kurangnya inovasi pemerintah dalam mengelola sampah serta pemberian honor bagi petugas lapangan dan tenaga harian lepas. Kekurangan-kekurangan dan kendala yang dihadapi

DPPK Kota Tebingtinggi merupakan suatu bentuk evaluasi DPPK Kota Tebingtinggi dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas demi terciptanya sebuah tingkat kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan agar lebih akuntabel dan sesuai dengan pencapaian target yang ingin diraih.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkot Tebingtinggi mencapai hasil baik, yaitu suatu keharusan dalam mengukur sebuah kinerja organisasi dan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu organisasi untuk mencapai hasil yang akan dicapai oleh DPPK Kota Tebingtinggi dalam proses pengelolaan sampah. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan langkah awal DPPK Kota Tebingtinggi dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah.

SIMPULAN

Setelah melalui analisis yang dilakukan terjawablah permasalahan, yaitu efektivitas organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan (DPPK) dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi, yaitu

1. DPPK Kota Tebingtinggi dalam pengelolaan sampah kurang berjalan efektif hal ini karena tidak adanya kebijakan dan strategi khusus dalam penanganan sampah dan para stakeholders sehingga organisasi dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisien.
2. DPPK Kota Tebingtinggi kurang melakukan perencanaan dan program dalam pengolahan sampah serta tidak memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pengolahan sampah berdasarkan kapasitas sampah yang diolah.
3. DPPK Kota Tebingtinggi tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sampah. Termasuk kesejahteraan pekerja di bidang kebersihan khususnya yang bertugas mengangkut dan mengumpulkan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah menjadi kurang efektif.

4. DPPK Kota Tebingtinggi tidak menarik respons masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah di lingkungan sehingga program kegiatan organisasi dinas tidak berjalan dengan efektif.

SARAN

Selanjutnya, setelah melakukan analisis dan simpulan hasil analisis, penulis berusaha untuk memberikan suatu masukan mengenai efektivitas organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan (DPPK) dalam pengelolaan sampah di Kota Tebingtinggi. Adapun masukan ini didasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. DPPK Kota Tebingtinggi perlu membuat kebijakan khusus penanganan sampah dengan memanfaatkan para stakeholders guna pengelolaan sampah secara tepat, efektif, dan lebih efisien.
2. DPPK Kota Tebingtinggi perlu melakukan perencanaan & pelaksanaan rinci dari bentuk pengolahan sampah beserta semua sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pengolahan sampah yang memiliki spesifikasi teknis berdasarkan kapasitas sampah yang diolah. Baik dari pengolahan sampah organik, pengolahan sampah anorganik (daur ulang), pengolahan sampah anorganik (residu), gerobak atau motor sampah, gudang kompos padat/kompos cair/gas bio/sampah anorganik daur ulang/residu, kantor, serta utilitas pendukung.
3. DPPK Kota Tebingtinggi hendaknya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara pemantauan

pengelolaan sampah TPS 3R secara berkala mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, keberlanjutan program, sampai dengan pengembangan dan replikasi. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk *reward* dan *punishment* bagi pekerja. Hasil kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk input evaluasi kegiatan/program dan kesejahteraan pekerja di lapangan.

4. DPPK perlu melakukan penunjukan perwakilan dari setiap wilayah (kelurahan) sebagai anggota tim penanganan sampah yang memahami kondisi lingkungan terkait masalah sampah serta mampu mendeskripsikan kondisi di lokasi, seperti tokoh masyarakat, ketua RT, petugas kebersihan lingkungan dan lain-lain guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*.; Rineka Cipta. Jakarta
- Basriyanta, 2007, *Memanen Sampah*.; Kanisius. Yogyakarta
- Budiati Lilin, 2014, *Good Governance, Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1997. *Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design, Development Monograf number 2. Rural Development Committee center for International Studies*, Cornell University.
- Dwiyanto, Agus, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.; Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Gallion, Arthur B, dan Eisner, Simon, 1996, *Pengantar Perancangan Kota*, Alih Bahasa Sussongko dan Januar Wahyu Indarto.; Erlangga. Jakarta

- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma,: Erlangga. Jakarta
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*,: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hersey, Paul dan Blanchard, Ken, 1992, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Terjemahan Agus Dharma,: Erlangga. Jakarta
- Kaleka, Norbertus, 2010, *Kompos Dari Sampah Keluarga*,: Delta Media. Surakarta
- Moenir, HAS, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*,: Bumi Aksara. Jakarta
- Moleong, Lexy J, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,: Rosda Karya. Bandung
- Nasional, Dinas Pendidikan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,: PN. Balai Pustaka. Jakarta
- Nasution, S dan Thomas, M, 2010, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi Disertasi Makalah*,: Bumi Aksara. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta. Jakarta:
- _____. 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*,: Rineka Cipta. Jakarta
- PS. Tim Penulis, 2010, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*,: Penebar Swadaya. Jakarta
- Purwendro, Setyo dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*,: Penebar Swadaya. Jakarta
- Siahaan, NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,: Erlangga. Jakarta
- Slamet, Juli Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan*,: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Soefian, 2010, *Sukses Membuat Kompos Dari Sampah*,: Agro Media Pustaka. Jakarta
- Sepriyanto, "Syariat Islam Dalam Mewujudkan Clean Governance and Good Government", http://al_farih.blogspot.com.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*,: Penebar Swadaya. Jakarta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*,: Alfabeta. Bandung
- Suratmo, F. Gunawan, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*,: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2007, *Manajemen Publik*, PT. Grasindo, Jakarta
- Rosidin, Utang. 2000, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia. Bandung.
- Wardhana, Wisnu Arya, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*,: Andi. Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes, Simangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, IPDN Press. Jatinangor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Wali Kota No. 33 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan DPPK Kota Tebingtinggi
- Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebingtinggi

Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tebingtinggi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 17 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Melalui Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman yang Berbahan Plastik

Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 500 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2020

Peraturan Wali Kota Tebingtinggi No. 556 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Keperluan Pemerintah Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2020